

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Renstra Perangkat Daerah memiliki fungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan perangkat daerah, acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), sebagai tolak ukur kinerja dalam pencapaian tujuan Perangkat Daerah, serta mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 di mana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Walikota Kota Bekasi yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Sebagaimana diketahui bahwa Renstra Perangkat Daerah memiliki fungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan perangkat daerah, acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), sebagai tolak ukur kinerja dalam pencapaian tujuan Perangkat Daerah, serta mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Renstra Perangkat Daerah harus berpedoman dan harus memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2024-2026.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan control terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPD. Dalam hal ini Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi disusun untuk digunakan pada masa transisi perencanaan selama 3 tahun dengan mempertimbangkan RPD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Oleh karena itu rencana strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategis dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang ada dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya

tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan yang potensial. Di era otonomi daerah ini kemampuan pemerintah Kota Bekasi di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bekasi kearah yang diinginkan.

Penyusunan rencana strategis ini merupakan kerangka teknis dan sebuah kerangka besar pemberdayaan yang secara langsung menyentuh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bekasi. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UMKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran.

Pendekatan pembangunan secara ekonomi yang ditujukan pada pelaku ekonomi kerakyatan, khususnya pada koperasi dan UMKM. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata, maupun sektoral, sehingga

berkembanglah struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kokoh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal bahwa koperasi dan UMKM merupakan jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Atas dasar itu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kota Bekasi akan mengembangkan berbagai program dan kegiatan yang sesuai, tepat sasaran, berhasil, berguna dan bermanfaat secara langsung bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kota Bekasi. Pemahaman terhadap permasalahan dan identifikasi tiap pelaku, diharapkan dapat mempercepat upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara lebih luas dengan penyebaran yang lebih merata, yang bertujuan untuk mengatasi masalah internal dan eksternal yang dihadapi Koperasi dan UMKM sehingga mereka memperoleh jaminan kepastian dan kesempatan berusaha di Kota Bekasi.

Sebagaimana hal tersebut, maka dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 berfungsi untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan dan mengaktifkan Koperasi, UMKM, serta mempromosikan hasil produk usaha kecil dan menengah di Kota Bekasi. Selanjutnya sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (investor) Kota Bekasi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - l. Peraturan Pemerintah Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM;
 - m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - q. Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang SAKIP;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
 - s. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- t. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- x. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- y. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
- z. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- aa. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
- bb. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Disamping itu penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini dimaksudkan memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh *stakeholders* pembangunan Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan

cita-cita dan tujuan pembangunan Koperasi dan UMKM sebagai bagian integral dari pembangunan Daerah Kota dan Daerah Provinsi maupun Pembangunan Nasional sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap *stakeholders* pembangunan Koperasi usaha Kecil dan menengah akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
- 2) Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh: RT/RW, Dokumen Potensi Daerah, dll.) ke dalam sebuah rencana strategis;
- 3) Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan SKPD supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;
- 4) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam Perangkat Daerah, antar Perangkat Daerah, antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 5) Sebagai tolak ukur dan evaluasi kinerja di lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum Penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, Capaian Program Prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yang telah dihasilkan, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi tahun 2024-2026.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BEKASI

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dan penentuan Isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, serta Cascading Kinerja mulai dari Tujuan sampai dengan Outcome dan output.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi informasi mengenai rencana program, kegiatan dan besaran pendanaan yang direncanakan untuk periode Tahun 2024-2026.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun Kota Bekasi 2024-2026.

BAB VIII . PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan harapan kepada seluruh unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam rangka upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BEKASI

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

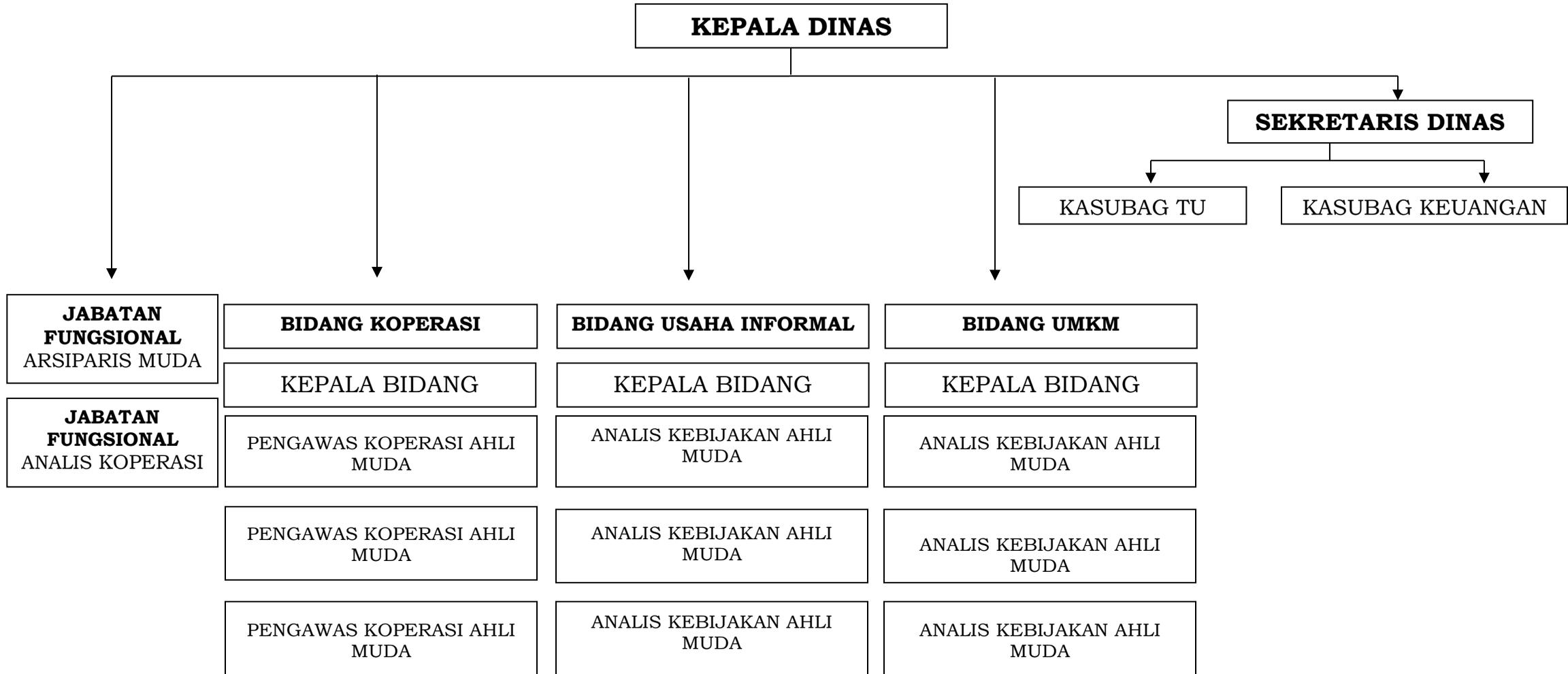
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi berdiri pada Januari Tahun 2017, setelah sebelumnya bergabung dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Fasilitas UKM, dan Usaha Informal.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dilakukan penyesuaian Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 diubah menjadi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Koperasi;
- d. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Bidang Usaha Informal;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dapat dilihat pada Gambar 2.1. Uraian tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Dilihat dari sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, maka masih perlu adanya penambahan pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas. Khususnya yang memiliki keahlian di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang ada, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senantiasa berupaya untuk lebih meningkatkan pembinaan baik melalui pendidikan umum maupun pelatihan yang bersifat teknis.

Upaya yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) mulai dari Diklatpim II, Diklatpim III sampai Diklatpim IV dengan rincian sebagai berikut:

- Diklatpim II sebanyak 1 orang
- Diklatpim III sebanyak 4 orang
- Diklatpim IV sebanyak 8 orang

Pendidikan dan pelatihan dimaksud untuk menambah wawasan dan kemampuan bagi aparatur didalam pelaksanaan inovasi dan implementasi agar mampu menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pekerjaan.

b. Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat teknis untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, maka perlu adanya pendidikan dan pelatihan teknis antara lain:

- Pelatihan Perkoperasian
- Pelatihan Pengawas koperasi
- Pelatihan Tata Kelola Koperasi
- Pelatihan Strategi promosi UMKM
- Pelatihan Peningkatan potensi UMKM
- Pelatihan Perencanaan Strategis Pengembangan Sektor Usaha Mikro
- Pelatihan Motivasi Kewirausahaan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi memiliki berapa Standar Operasional Prosedur (SOP), antara lain:

1. SOP Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam;

2. SOP Penilaian Kesehatan koperasi Simpan pinjam atau Unit Simpan pinjam;
3. SOP Penerbitan surat persetujuan Izin Usaha Simpan pinjam pada koperasi;
4. SOP Penerbitan Surat keterangan Binaan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan, Pembiayaan dan Informasi (SIP3);
5. SOP Penyelenggaraan Sosialisasi/ Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
6. SOP Pelaksanaan Pemasangan Neon BOX bagi pelaku usaha Warung gabus Pucung di Kota Bekasi;
7. SOP Informasi Publik;
8. SOP Fasilitasi Pengajuan Sertifikat Halal;
9. SOP Sosialisasi Pelatihan UMKM;
10. SOP Monitoring dan evaluasi UMKM binaan;
11. SOP Pelaksanaan Promosi UMKM;
12. SOP Penerbitan Surat Keterangan Binaan;
13. SOP Pengolahan data informasi potensi produk unggulan;
14. SOP Sosialisasi Sertifikat Halal;
15. SOP Penyusunan Data Analisa Pengembangan Kemitraan PKL Dunia Usaha;
16. SOP Pengolahan Data Fasilitasi Promosi dan Kemitraan usaha Informal;
17. SOP Sosialisasi Fasilitasi Promosi dan Kemitraan Usaha Informal;
18. SOP Penyusunan Petunjuk Teknis Pengembangan kemitraan PKL dengan Dunia Usaha;
19. SOP Sosialisasi Pencapaian Standarisasi Ketrtiban dan Kebersihan Lokasi usaha PKL;
20. SOP Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan berusaha PKL;
21. SOP Penyusunan Data Analisa bahan Kebijakan Pemberdayaan PKL;
22. SOP Penyusunan Data PKL;
23. SOP Penyusunan Kajian Peningkatan Kemampuan usaha PKL;
24. SOP Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberdayaan PKL;
25. SOP Sosialisasi Pemberdayaan PKL;
26. SOP Penerbitan TDU;
27. SOP Perpanjangan TDU;

28. SOP Petunjuk teknis Peremajaan Lokasi PKL;
29. SOP Penyusunan Petunjuk Teknis Penetapan Lokasi PKL;
30. SOP Pencabutan Tanda daftar Usaha (TDU) PKL.

2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Bekasi, merupakan unit kerja pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang memberikan pelayanan pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Jumlah Pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi berjumlah 41 orang terdiri dari 22 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 Tenaga Kontrak kerja (TKK), dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sampai Strata III dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Sumber Daya Manusia

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PNS	TKK	KET
1	SLTA	6	5	
2	Strata I	8	13	
3	Strata II	7	1	
4	Strata III	1		
JUMLAH		22	19	

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2024

a. Data Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan tingkat usia, Komposisi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Pegawai berusia 21-30 tahun, sebanyak 0 orang
2. Pegawai berusia 31-40 tahun, sebanyak 17 orang
3. Pegawai berusia 41-50 tahun, sebanyak 11 orang
4. Pegawai berusia 51-60 tahun, sebanyak 13 orang

b. Data Pegawai Berdasarkan Penempatan Bidang dan Golongan

Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi terdapat 22 orang PNS dan 19 orang TKK. PNS yang tersebar pada beberapa bidang diantaranya, Sekretariat golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 5 orang, golongan II sebanyak 2 orang, Bidang Koperasi golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 3 orang, golongan II sebanyak orang. Bidang Usaha Mikro

dan Fasilitasi UKM Golongan IV sebanyak 0 orang, golongan III sebanyak 1 orang dan golongan II sebanyak 1 orang. Bidang Informal golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 3 orang dan golongan II sebanyak 2 orang dan jumlah TKK sebanyak 19 orang

Tabel 2.2

Data PNS Berdasarkan Bidang dan Golongan

GOLONGAN				Total
Bidang	IV	III	II	
Sekretariat	2	5	2	9
Koperasi	2	3	-	5
Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM	0	1	1	2
Informal	1	3	2	6
Jumlah	5	12	5	22

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2024

Tabel 2.3

Data PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	8
2	Laki-laki	14
Jumlah		22

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2024

c. Data Pegawai Berdasarkan Tenaga Kontrak Kerja

Bila dilihat persebarannya, dari total 41 pegawai pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, maka sebesar 29% pegawai adalah golongan III, 12% adalah golongan II, dan 12% adalah golongan IV. Sedangkan TKK sebesar 47%. Adapun jumlah Tenaga Kontrak berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang dan jenis kelamin wanita sebanyak 14 orang.

Tabel 2.4

Data Jumlah TKK

TKK	Jumlah
Laki -Laki	5
Perempuan	14
Jumlah	19

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2024

d. Penempatan Pegawai pada Bidang-Bidang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penempatan pegawai (PNS) berdasarkan Tingkat pendidikan Keseluruhan berjumlah 22 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Sekretariat SMA sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 2 orang dan S2 sebanyak 4 orang;
- Bidang Koperasi SMA sebanyak 0 orang, S1 sebanyak 3 orang, S2 sebanyak 2 orang;
- Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas UKM SMA sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 1 orang dan S2 sebanyak 0 orang;
- Bidang Usaha Informal SMA sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 1 orang dan S3 sebanyak 1 orang.

Tabel 2.5.

Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Bidang

PENDIDIKAN					Total
Bidang	SMA	S1	S2	S3	
Sekretariat	3	2	4	-	9
Koperasi	0	3	2	-	5
Usaha Mikro dan Fasilitas UKM	1	1	0	-	2
Usaha Informal	2	2	1	1	6
Jumlah	6	8	7	1	22

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2024

2.2.2 Aset/Modal

Dalam Menunjang kinerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi memiliki Kendaraan Operasional, Peralatan/Perlengkapan sebagai berikut:

Tabel 2.6
DATA KONDISI KENDARAAN DINAS, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OPERASIONAL

NO	NAMA BARANG	MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Inova G	2016	1 Unit	√				
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Daihatsu/Terios 1.5 R F700RG	2017	1 Unit	√				
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Daihatsu Terios F700 RG TX M/T	2016	1 Unit	√				
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Daihatsu Terios F700 RG	2010	1 Unit	√				
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Inova G	2007	1 Unit	√				
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Avanza 1300 G	2008	1 Unit	√				
7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki /GC415 V APV DLX MT	2005	1 Unit	√				
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Grand Lux Luxuri	2003	1 Unit	√				
9	Pick Up	Toyota / Kijang	2006	1 Unit	√				
10	Sepeda Motor	Honda / MCB	2003	1 Unit	√				
11	Sepeda Motor	Honda Win / MCB	2003	1 Unit	√				
12	Sepeda Motor	HONDA / MCB 97 SPORT	2004	1 Unit			√		
13	Sepeda Motor	SUZUKI SMASH / FD 110 XCSDF	2004	1 Unit	√				
14	Sepeda Motor	HONDA / WIN MCB 97	2005	1 Unit	√				
15	Sepeda Motor	Honda / Revo NF.11B1D M/T	2010	1 Unit	√				
16	Sepeda Motor	YAMAHA / MIO M3 CW VIN 2018 / SE 88	2018	1 Unit	√				2 Unit
17	Sepeda Motor	YAMAHA / MIO M3 CW VIN 2018 / SE 88	2018	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
18	Sepeda Motor	YAMAHA / MIO M3 CW VIN 2018 / SE 88	2018	1 Unit	√				
19	Sepeda Motor	Honda Absolute Revo 110	2010	1 Unit	√				
20	Sepeda Motor	Honda Absolute Revo 110	2010	1 Unit	√				
21	Sepeda Motor	Honda Revo	2014	1 Unit	√				
22	Elektrik Panel Control	-	2020	1 Unit	√				
23	Scanner (Universal Tester)	-	2020	1 Unit	√				
24	Handheld Teropong	-	2020	1 Unit	√				
25	Rak-Rak Penyimpan	-	2017	4 Unit	√				
26	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Brother / GX-8250	2013	1 Unit	√				
27	Mesin Ketik Listrik	Brother GX8250	2015	1 Unit	√				
28	Lemari Besi/Metal	Huben	2012	1 Unit			√		
29	Lemari Besi/Metal	BROTHER / 2 Pintu Ayun	2014	1 Unit	√				
30	Lemari Besi/Metal	DATASCRIP / 2 Pintu Ayun	2015	1 Unit	√				
31	Lemari Besi/Metal	Safeguard	2017	2 Unit	√				
32	Lemari Besi/Metal	Brother / Sliding Door	2021	1 Unit	√				
33	Lemari Besi/Metal	Brother / Swing Door Warna Abu-abu/putih	2021	1 Unit	√				
34	Lemari Besi/Metal	Brother / Swing Door warna abu-abu/putih	2021	1 Unit	√				
35	Lemari Kayu	-	2016	1 Unit	√				
36	Rak Besi	-	2016	1 Unit	√				
37	Rak Besi	-	2016	1 Unit	√				
38	Rak Besi	-	2016	1 Unit	√				
39	Rak Besi	-	2016	1 Unit	√				
40	Rak Besi	-	2016	1 Unit	√				
41	Rak Besi	-	2016	1 Unit	√				
42	Rak Besi	Custom	2017	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
43	Rak Besi	Custom	2017	1 Unit	√				
44	Filing Cabinet Besi	DATASCRIP / 4 Laci	2015	1 Unit	√				
45	Filing Cabinet Besi	SAFEGUARD	2017	2 Unit	√				
46	Lemari Display	-	2020	1 Unit	√				
47	Lemari Display	-	2020	1 Unit	√				
48	Lemari Display	-	2020	1 Unit	√				
49	Lemari Display	-	2020	1 Unit	√				
50	Lemari Display	-	2020	1 Unit	√				
51	Lemari Display	-	2020	1 Unit	√				
52	Lemari Display	-	2020	1 Unit	√				
53	Lemari Display	-	2020	1 Unit	√				
54	Lemari Display	-	2020	1 Unit	√				
55	Lemari Kaca	Etalase/Rak Display	2014	1 Unit			√		
56	Lemari Kaca	-	2015	1 Unit	√				
57	Lemari Kaca	ETALASE/LEMARI DISPLAY	2015	8 Unit			√		
58	Lemari Kaca	Etalase/Lemari Display	2015	1 Unit	√				
59	Lemari Kaca	SAFEGUARD	2017	2 Unit	√				
60	Lemari Kaca	-	2020	1 Unit	√				
61	Lemari Kaca	-	2020	1 Unit	√				
62	Lemari Kaca	-	2020	1 Unit	√				
63	CCTV - Camera Control Television System	-	2020	1 Unit	√				
64	Alat Penghancur Kertas	-	2017	1 Unit			√		
65	Alat Penghancur Kertas	Primatch/Paper Shredder	2022	3 Unit	√				
66	Mesin Absensi	SOLUTION	2016	1 Unit			√		
67	Mesin Absensi	Fingerplus	2017	2 Unit	√				
68	LCD Projector/Infocus	Proyektor Infokus IN112 / 3800 ANSI LUMENS,	2021	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
		SVGA							
69	Meja Kerja Besi/Metal	-	2020	1 Unit	√				
70	Meja Kerja Besi/Metal	-	2020	21 Unit	√				
71	Meja Kerja Kayu	-	2020	5 Unit	√				
72	Meja Rapat	Custom	2020	1 Unit	√				
73	Meja 1/2 Biro	-	2017	1 Unit	√				
74	Meja 1/2 Biro	-	2010	4 Unit	√				
75	Meja 1/2 Biro	Erotek / 1/2 Biro	2010	1 Unit	√				
76	Meja 1/2 Biro	Erotek	2012	1 Unit	√				
77	Meja 1/2 Biro	GLORY / GD 1260 TL & GP-03, 1/2 BIRO	2012	1 Unit	√				
78	Meja 1/2 Biro	GLORY / GD 1260 TL & GP-03, 1/2 BIRO	2012	1 Unit	√				
79	Meja 1/2 Biro	Meja Kerja / 1/2 Biro	2012	1 Unit	√				
80	Meja 1/2 Biro	1 Biro	2014	1 Unit	√				
81	Meja 1/2 Biro	1/2 BIRO	2015	1 Unit	√				
82	Kursi Rapat	Napoli III GAR T4	2017	1 Unit	√				
83	Kursi Rapat	Napoli III GAR T4	2017	1 Unit	√				
84	Kursi Rapat	Napoli III GAR T4	2017	1 Unit	√				
85	Kursi Rapat	Napoli III GAR T4	2017	1 Unit	√				
86	Kursi Rapat	Napoli III GAR T4	2017	1 Unit	√				
87	Kursi Rapat	Napoli III GAR T4	2017	1 Unit	√				
88	Kursi Rapat	Napoli III GAR T4	2017	1 Unit	√				
89	Kursi Rapat	Napoli III GAR T4	2017	1 Unit	√				
90	Kursi Rapat	Napoli III GAR T4	2017	1 Unit	√				
91	Kursi Rapat	Napoli III GAR T4	2017	1 Unit	√				
92	Kursi Rapat	Napoli III GAR T4	2017	1 Unit	√				
93	Kursi Rapat	-	2017	1 Unit	√				
94	Kursi Rapat	-	2020	45 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
95	Kursi Biasa	-	2020	1 Unit	√				
96	Kursi Biasa	-	2020	1 Unit	√				
97	Kursi Lipat	Futura (27 Buah)	2012	1 Unit			√		10 Unit
98	Meja Komputer	-	2012	1 Unit			√		
99	Meja Komputer	LOKAL	2012	1 Unit	√				
100	Meja Komputer	LOKAL	2013	1 Unit	√				
101	Sofa	Lokal	2013	1 Unit	√				
102	Sofa	Sofa Office / Doubel	2012	1 Unit	√				
103	Sofa	INFORMA	2015	1 Unit	√				
104	Sofa	Custom	2016	1 Unit	√				
105	Sofa	Custom	2017	1 Unit	√				
106	Meubeleur lainnya	Custom	2017	1 Unit	√				
107	Meubeleur lainnya	Custom	2017	1 Unit	√				
108	Alat Pembersih Lainnya	Custom	2021	6 Unit	√				
109	Lemari Es	National	2017	1 Unit	√				
110	Lemari Es	-	2003	1 Unit			√		
111	Televisi	Samsung	2010	1 Unit			√		
112	Televisi	Samsung	2020	1 Unit	√				
113	Televisi	LG	2020	1 Unit	√				
114	Televisi	LG	2020	1 Unit	√				
115	Sound System	-	2020	1 Unit	√				
116	Sound System	Wireless 12 Inch 400 Watt	2020	1 Unit	√				
117	Wireless	BISMARCK BM	2021	1 Unit	√				
118	Wireless	Logitech Wireless Presenter R	2013	1 Unit			√		
119	Microphone	-	2017	1 Unit	√				
120	Microphone	-	2020	1 Unit	√				
121	Microphone	-	2020	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
122	Unit Power Supply	Pro Link	2020	1 Unit	√				
123	Unit Power Supply	APC / SCA420i	2012	1 Unit			√		
124	Camera film	-	2015	1 Unit			√		
125	Camera film	-	2007	1 Unit			√		
126	Bracket Standing Peralatan	-	2020	1 Unit	√				
127	Bracket Standing Peralatan	-	2020	1 Unit	√				
128	Bracket Standing Peralatan	-	2020	1 Unit	√				
129	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Sealer (Multifunctional Film)	2020	1 Unit		√			
130	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Sealer (Multifunctional Film)	2012	2 Unit			√		
131	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2012	1 Unit			√		
132	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2012	1 Unit			√		
133	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2012	1 Unit			√		
134	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Karpet Lantai	2012	1 Unit			√		
135	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2014	1 Unit			√		
136	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Informa	2020	1 Unit			√		
137	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Elite MKP	2017	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
138	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Informa	2015	1 Unit	√				
139	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Custom	2017	4 Unit	√				
140	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Elite MKS	2015	2 Unit	√				
141	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Custom	2017	10 Unit	√				
142	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Evergreen	2017	1 Unit	√				
143	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Elite MKP / Kursi Pimpinan	2010	1 Unit			√		
144	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Napoli I GAR Cpt T9W	2015	1 Unit	√				
145	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2017	1 Unit	√				
146	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Senator III GAR Synch FxA	2017	5 Unit	√				
147	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	LUFO / L-810	2012	3 Unit	√				
148	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	LUFO / L-810	2012	2 Unit			√		
149	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Elite EL603	2012	1 Unit			√		
150	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Athena GA Bas T14	2017	14 Unit	√				5 Unit
151	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Ichiko / IC 609 1 Biro	2017	2 Unit			√		

NO	NAMA BARANG	MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
152	Kursi Kerja Pejabat lainnya	INDACHI / D-520 Black Oscar	2011	1 Unit			√		
153	Kursi Kerja Pejabat lainnya	ICHIKO	2016	1 Unit					
154	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	SAFEGUARD	2017	1 Unit	√				
155	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	SAFEGUARD	2017	1 Unit	√				
156	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2017	1 Unit					
157	Layar Film/Projector	WXGA	2012	1 Unit			√		
158	Layar Film/Projector	Brite Tripoid 70 inch TRI-1818	2017	1 Unit	√				
159	Layar Film/Projector	Infocus Proyektor IN226	2017	1 Unit	√				
160	Layar Film/Projector	Wallscreen	2017	1 Unit	√				
161	LCD Monitor	-	2017	1 Unit	√				
162	LCD Monitor	-	2020	5 Unit	√				
163	Personal Computer	-	2020	1 Unit	√				
164	Kamera Digital	Canon Eos	2020	1 Unit	√				
165	Local Area Network (LAN)	Network Cabel	2020	1 Unit	√				
166	Local Area Network (LAN)	Network Tools	2015	1 Unit			√		
167	P.C Unit	Extron	2015	1 Unit			√		
168	P.C Unit	ADVAN	2009	1 Unit			√		
169	P.C Unit	ADVAN	2011	1 Unit			√		
170	P.C Unit	Acer, Komputer P.C	2011	1 Unit	√				
171	P.C Unit	Acer, Komputer P.C	2012	1 Unit	√				
172	P.C Unit	Intel PC	2012	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
173	P.C Unit	HP Pavilion / HPE Series	2012	1 Unit	√				
174	P.C Unit	HP PROLIAN / ML11067	2012	1 Unit	√				
175	P.C Unit	LENOVO	2012	1 Unit			√		
176	P.C Unit	LENOVO	2012	1 Unit			√		
177	P.C Unit	LENOVO	2012	1 Unit			√		
178	P.C Unit	HP	2012	14 Unit			√		
179	P.C Unit	ACER / TC-605	2015	2 Unit			√		
180	P.C Unit	HP / 22-2000d	2015	1 Unit	√				
181	P.C Unit	ACER / AZ1601	2015	2 Unit			√		
182	P.C Unit	ACER	2015	1 Unit	√				
183	P.C Unit	ACER	2016	1 Unit	√				
184	P.C Unit	Dell All-In One Inspiron	2017	10 Unit	√				
185	P.C Unit	HP Pavilion All-In-One	2017	1 Unit	√				
186	P.C Unit	HP / PRO ONE 400	2017	1 Unit	√				
187	P.C Unit	ASUS / All-In-One V221ICUK-BA164T	2017	1 Unit	√				
188	P.C Unit	ASUS / All-In-One V221ICUK-BA164T	2018	1 Unit	√				
189	P.C Unit	ACER / AIO Veriton Z4660 Intel Core i3	2018	1 Unit	√				
190	P.C Unit	ACER / AIO Veriton Z4660 Intel Core i3	2020	1 Unit	√				
191	P.C Unit	Asus	2020	1 Unit	√				
192	P.C Unit	Asus	2020	1 Unit	√				
193	P.C Unit	Asus	2020	1 Unit	√				
194	P.C Unit	Asus	2020	1 Unit	√				
195	P.C Unit	Asus	2020	1 Unit	√				
196	P.C Unit	Lenovo / Ideacentre A340	2020	1 Unit	√				
197	P.C Unit	Lenovo / Ideacentre A340	2021	1 Unit	√				
198	P.C Unit	Lenovo / Ideacentre A340	2021	1 Unit	√				
199	P.C Unit	ACER / AIO, INTEL CORE i3-8100	2021	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
200	Lap Top	Dell	2021	1 Unit	√				
201	Lap Top	Dell	2012	1 Unit	√				
202	Lap Top	ASUS / A442UR-GA041T	2012	1 Unit	√				
203	Lap Top	Lenovo Flex 5 14 / Intel Core i5 gen 10 Ram 8 GB	2018	1 Unit	√				
204	Note Book	Dell Inspiron 15 5567	2021	1 Unit	√				
205	Personal Komputer lainnya	Lenovo	2017	1 Unit	√				
206	Personal Komputer lainnya	Lenovo	2020	1 Unit	√				
207	Personal Komputer lainnya	Lenovo	2020	1 Unit	√				
208	Hard Disk	SEAGATE / HARD DISK PORTABLE 1 TB	2020	1 Unit	√				
209	Hard Disk	SEAGATE / HARD DISK PORTABLE 1 TB	2015	1 Unit			√		
210	Peralatan Minikomputer lainnya	Kaspersky	2015	1 Unit					
211	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Asus Strix	2020	1 Unit	√				
212	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Asus Strix	2020	1 Unit	√				
213	Monitor	HP	2020	1 Unit	√				
214	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet P1102	2012	1 Unit					
215	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / Printer Laser	2010	1 Unit			√		
216	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Laser Jet P1102	2012	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
217	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Laser Jet P1102	2012	1 Unit	√				
218	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASER JET P1002	2012	1 Unit			√		
219	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA	2013	1 Unit			√		
220	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA	2013	1 Unit			√		
221	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L210 A4	2013	1 Unit	√				
222	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L210 A4	2014	1 Unit			√		
223	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2014	1 Unit			√		
224	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 220	2014	1 Unit	√				
225	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 220	2015	1 Unit	√				
226	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 220	2015	1 Unit			√		
227	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 220	2015	1 Unit			√		
228	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Xerox Docuprint / P255DW	2015	1 Unit			√		
229	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2015	1 Unit			√		
230	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L-220	2015	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
231	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L-220	2015	1 Unit	√				
232	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2015	1 Unit			√		
233	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L385	2017	10 Unit	√				5 Unit
234	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson LQ-2190	2017	1 Unit	√				
235	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / Multifunction Inkjet Printer FIXMA G3010	2017	2 Unit	√				
236	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2020	7 Unit	√				
237	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3110	2020	2 Unit	√				
238	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Ecotank L3251 A4 Wifi	2022	1 Unit	√				
239	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Ecotank	2022	2 Unit	√				
240	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-	2021	1 Unit	√				
241	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Logitech	2020	1 Unit	√				
242	External/ Portable Hardisk	-	2012	1 Unit	√				
243	External/ Portable Hardisk	-	2020	1 Unit	√				
244	External/ Portable Hardisk	-	2020	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
245	External/ Portable Hardisk	-	2020	1 Unit	√				
246	External/ Portable Hardisk	-	2020	1 Unit	√				
247	External/ Portable Hardisk	-	2020	1 Unit	√				
248	External/ Portable Hardisk	-	2020	1 Unit	√				
249	Server	HP / DL380D7-Intel Xeon E5630	2015	1 Unit			√		
250	Router	Mikrotik Routerboard CCR1009-8G-1S	2015	1 Unit			√		
251	Hub	Switch 16 Port	2015	2 Unit			√		
252	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	Custom / Neon Box	2021	50 Unit	√		√		
253	Bahan Perpustakaan Lainnya	Custom	2021	4 Unit	√				
254	Buku Umum Lain-Lain	Custom	2022	3 Unit	√				

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

2.3.1. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Tahun 2019 Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kota Bekasi memiliki program-program baru yang disesuaikan dengan Nomenklatur baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan disusul dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Capaian kinerja Program-program dan Capaian Indikator kinerja Kunci tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.7

Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2018-2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	✓ Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Jumlah Pelaku UMKM Kreatif			✓	10%	10%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	5.1%	5%	100%	50%	100%	102%	100%
2	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha kecil			✓	2%	2%	1%	1%	1%	2%	0.2%	0.3%	1%	1%	100%	20%	30%	100%	100%
3	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan perkoperasian			✓	-	-	100 orang pengurus	100 orang pengurus	100 orang pengurus	-	-	140 orang pengurus	215 orang pengurus	150 orang pengurus	-	-	140%	215%	150%
4	Peningkatan Skala Usaha Koperasi			✓	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	100%	100%	100%	100%

5	Jumlah Koperasi yang beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian			✓	-	-	100 unit	100 unit	100 unit	-	-	100 unit	102 unit	100 unit	-	-	100%	102%	100%
6	Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi Kesehatannya			✓	-	-	8.17%	8.17%	8.17%	-	-	13.07 %	8.17%	8.17%	-	-	160%	100%	100%
7	Persentase Koperasi yang memiliki Izin Simpan pinjam			✓	-	-	3.27%	13.07 %	8.17%	-	-	5%	4%	1.63%	-	-	153 %	30.60 %	19.95 %
8	Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan			✓	5%	15%	15%	15%	10%	7%	15%	15%	15%	11.09 %	140%	100%	100%	100%	110.90%

9	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		✓		-	6.8%	10%	10%	10%	-	6.8%	12.08%	13.65%	14.13%	100%	120.8%	136.5%	136.50	141.30%
10	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		✓		-	3.44%	20%	20%	20%	-	3.44%	21.21%	25.60%	36.07%	100%	106%	128%	128%	180.35%

Sumber: Data Olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2019-2023

Realisasi capaian Kinerja Indikator Peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil pada Tahun 2020 dan 2021 tidak tercapai dengan tingkat capaian Tahun 2020 sebesar 0,2% dari target 2% dan Tahun 2021 sebesar 0,3% dari target 1%. Hal tersebut dikarenakan Pandemi Covid yang memukul hampir semua sektor kehidupan. Ditambah adanya perubahan regulasi pada kriteria UMKM. Kriteria UMKM menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sedangkan di dalam aturan yang baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tertuang bahwa Usaha Mikro merupakan usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak sebesar Rp 2 miliar, sementara usaha Kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan paling banyak Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan paling banyak Rp 15 miliar.

Pada Tahun 2020 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pelaku UMKM Kreatif mencapai 5% dari target 10% yang ditetapkan. Penyebabnya adalah pandemi Covid-19, di mana masyarakat lebih mengutamakan berbelanja kebutuhan pokok dan menunda belanja kebutuhan lain. Sehingga usaha mikro pun membatasi produksi dan lebih memilih sistem *Pre Order* (PO).

Dari semua capaian indikator kinerja, rasio yang mencapai 100% dan lebih dari 100% adalah Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan, Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan Perkoperasian, Peningkatan Skala Usaha Koperasi, Jumlah Koperasi yang beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian, Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi Kesehatannya, dan Persentase Koperasi yang memiliki izin simpan pinjam.

Tabel 2.7

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024-2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	✓ Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada tahun ke-		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Persentase Koperasi yang memiliki Izin Simpan pinjam			✓	2%	2%	2%	-	-	-	-	-	-
2	Persentase Koperasi yang meningkat skala usahanya			✓	0,2%	0,2%	0,2%	-	-	-	-	-	-
3	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha kecil			✓	0,1%	0,1%	0,1%	-	-	-	-	-	-
4	Persentase PKL yang Menempati Tempat yang telah ditentukan			✓	10%	10%	10%	-	-	-	-	-	-

5	Persentase Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian			✓	10%	10%	10%	-	-	-	-	-	-
6	Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi Kesehatannya			✓	4%	4%	4%	-	-	-	-	-	-
7	Persentase Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian			✓	3%	3%	3%	-	-	-	-	-	-
8	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		✓		12.08%	12.08%	12.08%	-	-	-	-	-	-
9	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		✓		21.21%	21.21%	21.21%	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2022

2.3.2. Realisasi Anggaran

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Bekasi pada level program, akan dianalisis pengelolaan pendanaan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi periode sebelumnya yang dituangkan dalam tabel. 2.8

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019-2023

No	Uraian Program & Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2019 (jt)	2020 (jt)	2021 (jt)	2022 (jt)	2023 (jt)	2019 (jt)	2020 (jt)	2021 (jt)	2022 (jt)	2023 (jt)	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
I	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	-	-	358.680.000	25.000.000	74.360.000	-	-	206.632.000	18.840.000	62.493.000	-	-	57.61	75.30	84.04		
II	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	-	-	-	117.110.000	11.555.000	-	-	-	112.945.000	5.078.000	-	-	-	96.44	43.95		
III	Program Penilaian KSP/USP Koperasi	-	-	199.999.900	336.940.000	190.852.000	-	-	175.369.800	314.160.000	178.558.500	-	-	87.68	93.24	93.56		
IV	Program pendidikan dan Latihan Perkoperasian	-	-	200.000.000	529.940.000	349.880.000	-	-	192.625.000	490.147.500	524.230.500	-	-	96.31	92.49	95.34		
V	Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	150.000.000	550.000.000	-	284.636.000	214.957.000	10.025.000	518.610.000	-	236.357.000	1.132.711.000	6.68	94.29	-	83.04	97.27		

No	Uraian Program & Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2019 (jt)	2020 (jt)	2021 (jt)	2022 (jt)	2023 (jt)	2019 (jt)	2020 (jt)	2021 (jt)	2022 (jt)	2023 (jt)	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
VI	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	287.480.000	-	1.190.304.000	1.592.375.000	1.164.454.500	88.160.000	-	1.048.279.400	1.474.542.300	1.132.711.000	30.67	-	88.07	92.60	97.27		
VII	Program pengembangan UMKM	390.800.000	4.817.358.000	1.984.574.800	2.849.977.800	2.010.264.000	91.050.000	3.995.564.976	1.173.643.800	2.739.752.900	2.237.788.800	23.30	82.94	59.14	96.13	94.81		
VIII	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	9.089.519.926	9.234.188.720	-	-	-	8.475.404.219	7.623.789.399	-	-	-	93.24	82.56		
IX	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.523.971.600	1.369.475.000	-	-	-	1.244.571.415	1.248.149.900	-	-	-	81.67	91.14	-	-	-		
X	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.023.250	159.700.000	-	-	-	76.792.150	141.093.116	-	-	-	30.71	88.35	-	-	-		
XI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	20.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Uraian Program & Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2019 (jt)	2020 (jt)	2021 (jt)	2022 (jt)	2023 (jt)	2019 (jt)	2020 (jt)	2021 (jt)	2022 (jt)	2023 (jt)	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
XII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40.662.800	-	-	-	-	15.482.800	-	-	-	-	38.08	-	-	-	-		
XIII	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	69.388.000	-	-	-	-	69.388.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-		
XIV	Program penjaminan Kesehatan Koperasi	200.000.000	450.000.000	-	-	-	26.260.000	383.848.000	-	-	-	13.13	85.30	-	-	-		

Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2019-2022

Pada Tahun 2019 dan 2020 Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Bekasi melaksanakan 3 program di luar Program yang ada di Sekretariat, Program tersebut diantaranya adalah Program Penjaminan Kesehatan Koperasi, program Pemberdayaan Koperasi dan Program Pengembangan UMKM. Setelah itu terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga Dinas Koperasi melaksanakan 7 Program yang ada di bidang dan 1 program yang ada di Sekretariat.

Capaian Indikator program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi, Program Pemberdayaan UMKM, Program Pengembangan UMKM, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di tahun 2019 sangat rendah yaitu di bawah 50%. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2019 Kota Bekasi mengalami defisit anggaran sehingga beberapa kegiatan mengalami tunda bayar dan harus dilakukan efisiensi.

2.3.3. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal memiliki kelompok sasaran layanan yaitu Koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal.

Sampai dengan tahun 2022 jumlah UMKM binaan (SIP3) Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah mencapai 8.189 unit usaha, yang jumlahnya akan terus bertambah sesuai dengan target pendataan UMKM dari Kementerian Koperasi, UKM di Kota Bekasi sebanyak 9.600 unit usaha.

Menurut data *Online Data System* (ODS) jumlah Koperasi keseluruhan yang ada di Kota Bekasi sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1.414 unit usaha. Dengan jumlah koperasi aktif 81% atau sebanyak 1.152 unit usaha.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Usaha informal yang sudah menempati tempat yang telah ditetapkan mencapai 792 unit usaha yang tersebar di 21

lokasi binaan. Sedangkan jumlah usaha informal sampai dengan tahun 2022 mencapai 2.028 unit usaha.

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi
Berdasarkan Sasaran Strategis
Tahun 2019-2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi 	0.097%	0.13%	134%	0.098%	0.085%	86.7%	-	-	-
			0.036%	0.037%	102%	0.04%	0.013%	32%			

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi 	10 unit	10 unit	100%	10 unit	11 unit	110%	-	-	-
	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas	Nilai AKIP	-	-	-	-	-	-	65	75.48	116.1%
	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi 	-	-	-	-	-	-	0.1	0.15	150%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi 	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi 	-	-	-	-	-	-	20%	28%	140%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Melihat Capaian Kinerja Sasaran 2019 secara keseluruhan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sudah berhasil karena realisasi tiap indikator mencapai 100% dan lebih dari 100%. Keberhasilan ini bisa tercapai karena adanya pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dari aspek SDM, manajerial, dan permodalan. Sedangkan untuk Capaian Kinerja Sasaran 2020 secara keseluruhan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, satu indikator yang capaiannya melebihi 100%, sedangkan satu indikator masih di bawah 100%.

Pada Tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi memiliki dua Sasaran yaitu Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai AKIP. Di tahun 2021 target nilai AKIP Diskopukm sebesar 65 dengan realisasi sebesar 75,48. Capaian untuk tahun ini sebesar 116.1%. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM dengan tiga Indikator Kinerja Sasaran, yaitu Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pertumbuhan ekonomi dan indikator kinerja sasaran ketiga adalah Persentase Peningkatan Kesehatan Koperasi. Di tahun 2021 target Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.1% dengan realisasi 0.15%. Capaiannya untuk tahun ini sebesar 150%. Indikator kinerja yang kedua adalah Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki target sebesar 0.05%, dengan realisasi 0.07%, sehingga capaian untuk tahun ini sebesar 140%. Indikator Kinerja Sasaran ketiga adalah Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi penetapan targetnya sebesar 20%, dengan realisasi 28%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 140%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi untuk bidang perkoperasian, UMKM dan sektor informal diantaranya sebagai berikut:

1. Respon masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menghimpun kekuatan ekonomi/ modal sendiri masih rendah;
2. Kualitas pengelola koperasi tentang perkoperasian masih kurang karena *basic*/dasar pendidikan para pengurus bervariasi;
3. Respon masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menghimpun kekuatan ekonomi/ modal sendiri masih rendah;

4. Kualitas pengelola koperasi tentang perkoperasian masih kurang karena *basic*/dasar pendidikan para pengurus bervariasi;
5. Belum terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi karena koperasi belum mendapatkan proteksi dalam bentuk jaminan pemerintah (Lembaga penjamin simpanan) seperti Lembaga keuangan;
6. Respon pelaku UMKM terhadap kegiatan sangat kurang dikarenakan pelaku UMKM sulit meninggalkan kegiatan bisnis kesehariannya;
7. Kemampuan Pendidikan pelaku UMKM sangat bervariasi sehingga sulit menyatukan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan atau program;
8. Keterbatasan akses pasar dan modal dikarenakan ukuran aktifitas bisnisnya sangat terbatas sehingga sulit untuk mengembangkan *networking*nya;
9. Terbatasnya lahan untuk relokasi PKL;
10. Rendahnya kesadaran hukum PKL;
11. Belum maksimalnya penegakan hukum bagi PKL yang melanggar ataupun kepada oknum yang memanfaatkan PKL.

Dari tantangan dan peluang yang dihadapi tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi perlu mengantisipasinya dengan berbagai program kegiatan seperti melaksanakan sosialisasi perkoperasian secara intens, fasilitasi pendirian koperasi di lingkungan masyarakat (koperasi masjid berbasis Syariah yang sudah didukung dengan ditetapkannya SK Wali Kota Bekasi Nomor 518/Kep.448-Ek/XI/2018 tentang Kegiatan Pembentukan Koperasi Masjid Berbasis Syariah di Kota Bekasi), program dana bergulir dari APBD Kota Bekasi, pembentukan konsorsium bisnis koperasi.

Untuk menghadapi tantangan dan peluang yang menyangkut UMKM dimana pelaku UMKM merupakan pelaku yang terbesar jumlahnya, yang mampu menyerap tenaga kerja serta memiliki diferensiasi terhadap permasalahan ekonomi perlu dilaksanakan fasilitasi pengembangan para pelaku UMKM dalam kapasitas SDM, akses pasar, akses permodalan, aspek kemitraan, aspek teknologi dan aspek legal yang akan mempengaruhi kontribusi terhadap PDRB perekonomian. Sedangkan untuk menangani hambatan dan masalah sektor informal dalam hal ini penanganan PKL perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan aturan tentang penataan dan pemberdayaan PKL, melakukan penertiban dan pendekatan secara persuasif kepada para PKL serta membantu dalam akses permodalan dan peningkatan kemampuan SDM baik dalam penguasaan teknologi dan pengembangan usahanya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KOTA BEKASI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, adalah melaksanakan Pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Gambaran masalah pokok, permasalahan dan akar masalah dalam tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan, Isu Strategis, Program Pembangunan dan program Prioritas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024-2026

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NO	PROGRAM PRIORITAS (sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)	DATA PENDUKUNG*)
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemasaran Produk UMKM • Keterbatasan Modal Usaha dari UMKM • Belum tersertifikasinya Produk UMKM • Kurangnya Pembinaan bagi pelaku UMKM • <i>Packaging</i> Produk kurang menarik • Minimnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Produk UMKM 	Rendahnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	1.	Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan Menengah di antaranya melalui penyelenggaraan event tahunan, seperti: Pekan Nasional Bekasi Kreatif; Bekasi Fashion Week; dan Sunday market	1.	Pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NO	PROGRAM PRIORITAS (sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)	DATA PENDUKUNG*)
	<p><i>Networking/Jaringan Bisnis</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya Sentra UMKM di Kota Bekasi • Banyaknya PKL yang menempati lokasi tidak sesuai dengan peruntukannya 						2.	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Kapasitas SDM yang mengelola koperasi • Pengetahuan tentang Perkoperasian di masyarakat masih relatif rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya manajemen tata kelola perkoperasian 	Penguatan kelembagaan koperasi				3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NO	PROGRAM PRIORITAS (sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)	DATA PENDUKUNG*)
	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak koperasi yang belum memiliki ijin simpan pinjam 						4.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan pinjam	
	<ul style="list-style-type: none"> Penegakan aturan terhadap koperasi masih relatif kurang Masih ada koperasi yang beroperasi tidak sesuai dengan 						5.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NO	PROGRAM PRIORITAS (sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)	DATA PENDUKUNG*)
	peraturan								
	<ul style="list-style-type: none"> Koperasi yang telah tersertifikasi kesehatannya jumlahnya relatif sedikit dibandingkan jumlah koperasi keseluruhan 						6.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NO	PROGRAM PRIORITAS (sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)	DATA PENDUKUNG*)
	<ul style="list-style-type: none"> • Permodalan Koperasi masih kurang • Terbatasnya <i>Networking</i> pada lembaga-lembaga pembiayaan/ keuangan 						7.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Berdasarkan laporan dari PT. BPRS bahwa revolving dana bergulir sekarang sudah mencapai lebih kurang Rp. 57 Milyar. Sedangkan Koperasi dan usaha mikro yang sudah mengakses sebanyak 1500 orang.

3.2. Telaahan Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Bekasi telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 yang di dalamnya tertuang tujuan dan sasaran Kota. Tujuan dan sasaran kota ini didukung oleh Perangkat daerah termasuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Berikut tujuan dan sasaran Kota yang didukung oleh tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi
Tahun 2024-2026

No	Tujuan Kota Bekasi	Sasaran Kota Bekasi	Tujuan Diskopukm	Sasaran Diskopukm
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja DISKOPUKM	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran DISKOPUKM
2	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Jasa (Koperasi dan UMKM)	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, akan terkait dengan kepentingan atau tugas fungsi beberapa Kementerian/Lembaga tingkat pusat dan perangkat daerah yang serupa di lingkungan Pemerintah daerah lainnya yang berbatasan dengan Kota Bekasi.

1. Kementerian Koperasi dan UMKM

- a. Kementerian Koperasi, dan UMKM merumuskan tujuan pembangunan tahun 2020-2024, yaitu Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern; Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global; dan Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi. Untuk itu, tujuan Tahun 2020-2024 diarahkan sebagai berikut: 1. Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern, dengan hasil: a. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas; dan b. Modernisasi Koperasi. 2. Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil: a. Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal; b. Transformasi UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok; dan c. Pertumbuhan Wirausaha Produktif. 3. Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi.
- b. Sasaran strategis kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2020-2024 adalah (1) Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern (2) Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal (3) Transformasi UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok (4) Pertumbuhan Wirausaha Produktif (5) Terwujudnya Kebijakan KUMKM yang Berkualitas (6) Terwujudnya Pemberdayaan KUMKM yang Efektif (7) Terwujudnya Data dan Informasi KUMKM yang Andal dan Terintegrasi (8) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM (9) Terwujudnya Profesionalitas ASN di Kementerian Koperasi dan UKM (10) Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM	Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Belum dimilikinya seluruh data potensi Koperasi di Kota Bekasi	Rendahnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Banyak Koperasi yang potensial di Kota Bekasi
2	Terwujudnya Data dan Informasi KUMKM yang Andal dan Terintegrasi	Data dan Informasi KUMKM belum sepenuhnya andal dan terintegrasi	Kurangnya Monitoring dan Evaluasi Pendataan koperasi dan UMKM	Adanya Pengembangan Aplikasi SIP3 yang rencananya akan terintegrasi dengan aplikasi SIMPKL

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat

kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis, analisa tersebut yaitu:

1. Koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat (*agent of development anda change*) yang akan memperkuat perekonomian masyarakat sehingga penguatan kelembagaan koperasi perlu dilakukan;
2. Penataan ruang publik untuk PKL dimaksudkan untuk menetapkan lokasi berusaha bagi PKL sehingga PKL bisa meningkatkan kemampuan berusaha dan mempromosikan usaha PKL pada lokasi yang semestinya dan event *Sunday Market* yang dibantu dengan perkuatan modal PKL melalui BPRS Patriot. Hal ini penting dilakukan karena PKL atau sektor informal menyerap tenaga kerja dan mendukung Tema pembangunan Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan daya saing daerah;
3. Dalam rangka UMKM berdaya saing diperlukan penguasaan teknologi dan internet yang menjadi penunjang kesuksesan usaha UMKM. Penguasaan teknologi ini bisa berbentuk produk atau pun aplikasi yang mampu membuat usaha UMKM efisien serta aplikasi berbasis android yang dirancang untuk memasarkan produk UMKM Indonesia secara online dan terintegrasi system. UMKM juga didorong untuk mengembangkan kualitas produknya sehingga produk lokal dapat dikelola menjadi produk unggulan daerah.

Berdasarkan analisis diatas, maka dirumuskan isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi pada tahun 2024 – 2026 adalah : **“Peningkatan Ekonomi Masyarakat”**.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama tiga tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi berfungsi menentukan arah kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah tiga tahun mendatang. Setiap langkah kerja yang dilakukan oleh setiap unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Agar tujuan renstra dapat terukur dan dimonitor maka ditetapkan sasaran dan indikator tujuan sebagai berikut

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

TUJUAN KOTA BEKASI	TUJUAN KOTA BEKASI
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota
INDIKATOR TUJUAN KOTA BEKASI	INDIKATOR TUJUAN KOTA BEKASI
Indeks Reformasi Birokrasi	Laju Pertumbuhan Ekonomi
SASARAN I	SASARAN II
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi
INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa
TUJUAN DISKOPUKM KOTA BEKASI	TUJUAN DISKOPUKM KOTA BEKASI

Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja DISKOPUKM
INDIKATOR TUJUAN
Nilai AKIP Diskopukm

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Jasa (Koperasi dan UMKM)
INDIKATOR TUJUAN
Persentase Peningkatan Nilai tambah koperasi dan UMKM

SASARAN I
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran DISKOPUKM
INDIKATOR SASARAN
Nilai AKIP DISKOPUKM

SASARAN II	
Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	
INDIKATOR SASARAN I	INDIKATOR SASARAN II
1. Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	2. Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM

PROGRAM
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM
Program pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

PROGRAM
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

PROGRAM
Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian

PROGRAM
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

PROGRAM
Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi

PROGRAM
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

PROGRAM
Program pengembangan UMKM

optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Optimalisasi Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Koperasi yang memiliki izin simpan pinjam	Persentase Koperasi yang meningkat skala usahanya	Persentase Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi Kesehatanannya	Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan	Persentase Peningkatan skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil
SEKRETARIAT			BIDANG KOPERASI	BIDANG KOPERASI	BIDANG KOPERASI	BIDANG KOPERASI	BIDANG KOPERASI	BIDANG KOPERASI	BIDANG KOPERASI
KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ Kota	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Koperasi yang diawasi sesuai peraturan perkoperasian	Jumlah Penilaian KSP/USP Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil yang Dikembangkan	Persentase Usaha Mikro yang mendapat Fasilitas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Design dan teknologi	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, cabang Pembantu dan kantor kas Koperasi Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah KeanggotaanD alam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan , penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan , serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM serta Design dan teknologi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan UKM dan kewirausahaan
KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro		

<p>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</p>	<p>Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>	<p>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p>	<p>Jumlah Koperasi yang mendapat penghargaan Kesehatan</p>	<p>Jumlah unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan pendampingan terhadap usaha Mikro</p>
<p>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</p>	<p>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</p>			
<p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>	<p>SUB KEGIATAN</p>			

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
KEGIATAN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
SUB KEGIATAN	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
SUB KEGIATAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
SUB KEGIATAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang
SUB KEGIATAN

Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan
SUB KEGIATAN
Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SUB KEGIATAN
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Tujuan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yaitu Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Diskopukm dan tujuan kedua yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Jasa (Koperasi dan UMKM).

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mendukung 2 (Dua) sasaran Kota Bekasi yaitu: sasaran Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah, dan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, jasa dan industri serta iklim usaha berbasis pengalaman (kreatif) dan Investasi. Untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah memiliki sasaran Dinas yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DISKOPUKM dan Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Dengan memerhatikan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tahun 2024-2026 serta untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026 dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik itu sumber daya manusia pada pelaku usaha mikro serta sumber daya manusia aparat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
2. Pengembangan pasar dengan meningkatkan jaringan pemasaran baik dengan membentuk UKM center maupun pameran-pameran di dalam negeri maupun luar negeri;
3. Pengembangan kemitraan antara Koperasi dan UKM berbasis kolaborasi;
4. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dengan kemudahan dalam perijinan dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal;
5. Peningkatan Kerjasama dengan DKM Masjid untuk mewujudkan Koperasi berbasis syariah;
6. Peningkatan Database KUMKM.

Tabel 5.1
Analisis SWOT

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan/Strength (S)	Kelemahan/ Weakness (W)	Peluang/ Opportunity (O)	Ancaman/ Threat (T)
Struktur Organisasi cukup handal dalam merespon kebutuhan manajerial	Keterbatasan jumlah SDM dan Skill yang sesuai dengan kebutuhan	Dukungan Pendanaan dari pusat untuk pengembangan KUMKM yang bersumber dari dana transfer	Kota Bekasi sebagai Kota Penyangga Ibu Kota berpotensi menambah angka kasus kejahatan, dan masalah konflik sosial

Dukungan dan Komitmen Kepala Daerah dalam Pengembangan dan Pemberdayaan KUMKM	Belum tersedianya basis data UMKM yang akurat	Dukungan dari lembaga keuangan/ pembiayaan untuk menunjang operasional Koperasi dan UMKM	Untuk memenuhi kebutuhan pokok Kota Bekasi sangat tergantung dengan pasokan dari Kota-kota di sekitarnya
Sudah ada kebijakan Pemerintah daerah yang mengatur Pemberdayaan UMKM		UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020.	

Agar tujuan serta sasaran Renstra dapat dicapai maka disusun strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi ke depan. Adapun arah kebijakan dari setiap strategi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Strategi (4)	Arah Kebijakan (5)
1.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja DISKOPUKM 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja DISKOPUKM 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis bukti dan data yang saling terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penyederhanaan birokrasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai proses bisnis dan peningkatan Kapasitas SDM aparatur

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Jasa (Koperasi dan UMKM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas dan kemampuan UMKM baik produk maupun SDM nya melalui pelatihan dan fasilitasi • Memperbanyak dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk • Memfasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung bagi Koperasi dan UMKM • Peningkatan Koperasi dan UMKM yang mandiri dan berdaya saing

No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Strategi (4)	Arah Kebijakan (5)
			<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pendirian koperasi di lingkungan masyarakat • Memberikan permodalan melalui dana bergulir atau pelatihan bagi koperasi dan UKM dengan mendorong peran organisasi non pemerintah • Meningkatkan sosialisasi perkoperasian dan pemahaman masyarakat tentang perkoperasian melalui optimalisasi penyuluhan, informasi, dan kemudahan dalam pemberian aspek legal dan karya nyata Koperasi 	

Dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi dilaksanakan dengan berbagai inovasi dalam program dan kegiatan. Inovasi yang akan dilaksanakan melalui digitalisasi koperasi, *Start Up* Digitalisasi marketing (inkubator UMKM) dan pengembangan aplikasi Simpkl.go.id yang online sehingga dapat diakses oleh operator di kecamatan se- Kota Bekasi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Upaya mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, maka ditetapkan program-program yang sesuai dan akan dilaksanakan selama tiga tahun ke depan. Perencanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Program pembangunan daerah dalam RPD.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BEKASI
TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penang gung jawab	Lokasi	Aktivitas/ Rincian Kegiatan	
										2024		2025		2026		Target	Rp				
										target	Rp	target	Rp	target	Rp						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja DISKOPUKM								Nilai AKIP Diskopukm	75.60	75.8	8.7 71. 302 .34 8	76	8,95 7,05 7,40 0	76.5	9.58 0.62 7.12 0	76.5	27,308 ,986,8 68	Sekret ariat Diskop ukm	Kota Bekasi		
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan dan Panganggaran DISKOPUKM							Nilai AKIP Diskopukm	75.60	75.8	8.7 71. 302 .34 8	76	8,95 7,05 7,40 0	76.5	9.58 0.62 7.12 0	76.5	27,308 ,986,8 68	Sekret ariat Diskop ukm	Kota Bekasi		
		2	17	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a		100%	100 %	8.7 71. 302 .34 8	100 %	8,95 7,05 7,40 0	100 %	9.58 0.62 7.12 0	100%	27,308 ,986,8 68	Sekret ariat Diskop ukm	Kota Bekasi		
		2	17	01				1	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100 %	1,0 66, 840 ,48 0	100 %	1,00 0,31 4,40 0	100 %	1,05 9,84 0,48 0	100%	3,122, 274,72 0	Sekret ariat	Kota Bekasi	

Tujuan	Sasaran		Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penang gung jawab	Lokasi	Aktivitas/ Rincian Kegiatan
										2024		2025		2026		Target	Rp			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2		3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2	17	01	201		Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	100 %	10, 000 ,00 0	100 %	3,00 0,00 0	100 %	5,00 0,00 0	100%	9,000, 000	Sekretariat Diskop ukm	Kota Bekasi	
			2	17	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	10,0 00,0 00	3 Laporan	3,00 0,00 0	3 Laporan	5,00 0,00 0	9,000,0 00	3 Laporan	Sekretariat Diskop ukm	Kota Bekasi	
			2	17	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100 %	1.0 56. 840 .48 0	100 %	997. 314. 400	100 %	1,05 6,84 0,48 0	100%	3,084, 651,36 0	Sekretariat	Kota Bekasi	
			2	17	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	12 Laporan	1.05 6.84 0.48 0	12 Laporan	997. 314. 400	12 Laporan	1,05 6,84 0,48 0	36 Laporan	3,084,6 51,360	Sekretariat	Kota Bekasi	

Tujuan	Sasaran		Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penang gung jawab	Lokasi	Aktivitas/ Rincian Kegiatan	
										2024		2025		2026		Target	Rp				
										target	Rp	target	Rp	target	Rp						
										7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2		3				4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2	17	01			Optimalisasi Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	7.142.442.000	100%	6.893.500	100%	7.424.410.000	100%	23,384,830,376	Sekretariat	Kota Bekasi		
			2	17	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah		100%	7.142.442.000	100%	6.893.500	100%	7.424.410.000	100%	23,384,830,376	Sekretariat Diskopukm	Kota Bekasi		
			2	17	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	837 Orang/Bulan	702 Orang/Bulan	7.132.442.000	628 Orang/Bulan	6.887.535.000	702 Orang/Bulan	7.429.410.000	702 Orang/Bulan	23,375,830,376	Sekretariat Diskopukm	Kota Bekasi	
			2	17	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	6,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	18,000,000	Sekretariat Diskopukm	Kota Bekasi	
			2	17	01			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1,062,019,868	100%	1,063,208,000	100%	1,084,376,640	100%	180,000,000	Sekretariat	Kota Bekasi		
			2	17	01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat	100%	100%	0	100%	99.250.000	100%	100,000,000	100%	180,000,000	Sekretariat	Kota Bekasi		

Tujuan	Sasaran		Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penang gung jawab	Lokasi	Aktivitas/ Rincian Kegiatan	
										2024		2025		2026		Target	Rp				
										target	Rp	target	Rp	target	Rp						
1	2		3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Daerah														
			2	17	01	205	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	0	1 paket	51.250.000	2 paket	60.000.000	4 paket	120,000,000	Sekretariat	Kota Bekasi		
			2	17	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	-	0	8 orang	48.000.000	5 orang	40.000.000	8 orang	60,000,000	Sekretariat	Kota Bekasi	
			2	17	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	590,019,868	100%	573,958,000	100%	564.376.640	100%	1,748,400,868	Sekretariat	Kota Bekasi		
			2	17	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	8 Paket	350,019,868	8 Paket	300,000,000	8 Paket	290,000,000	24 Paket	864,019,868	Sekretariat	Kota Bekasi	
			2	17	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	-	3 Paket	30,000,000	2 Paket	23,381,000	3 Paket	25,000,000	9 Paket	74,381,000	Sekretariat	Kota Bekasi	
			2	17	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	-	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	25,000,000	36 Dokumen	75,000,000	Sekretariat	Kota Bekasi	

Tujuan	Sasaran		Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penang gung jawab	Lokasi	Aktivitas/ Rincian Kegiatan	
											2024		2025		2026		Target	Rp				
											target	Rp	target	Rp	target	Rp						
1	2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
								Undangan yang Disediakan														
			2	17	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 laporan	25,000,000	12 laporan	25,000,000	12 laporan	20,000,000	36 Laporan	55,000,000	Sekretariat	Kota Bekasi		
			2	17	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	160,000,000	12 Laporan	160,000,000	12 Laporan	160.376.640	36 Laporan	580,000,000	Sekretariat Diskopukm	Kota Bekasi		
			2	17	01	206		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	0	12 Dokumen	45,577,000	12 Dokumen	44,000,000	1600 Dokumen	100,000,000	Sekretariat	Kota Bekasi		
			2	17	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	472,000,000	100%	390,000,000	100%	380,000,000	100%	1,130,000,000	Sekretariat	Kota Bekasi		
			2	17	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	250,000,000	5 Unit	200,000,000	5 Unit	210,000,000	20 Unit	600,000,000	Sekretariat	Kota Bekasi		

Tujuan	Sasaran		Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penang gung jawab	Lokasi	Aktivitas/ Rincian Kegiatan
											2024		2025		2026		Target	Rp			
											target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2	17	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	14 Unit	152,000,000	14 Unit	140,000,000	14 Unit	120,000,000	14 Unit	100,000,000	Sekretariat	Kota Bekasi	
			2	17	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	58 unit	50 Unit	70,000,000	50 Unit	50,000,000	50 Unit	50,000,000	150 unit	150,000,000	Sekretariat	Kota Bekasi	
			2	17	01			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	100%	-	0	100%	44.000,000	100%	40,000,000	100%	100,000,000	Sekretariat	Kota Bekasi	
			2	17	01			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya		-	0	2 Unit	44.000,000	2 Unit	40,000,000	4 Unit	100,000,000	Sekretariat	Kota Bekasi	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Jasa (Koperasi dan UMKM)									Persentase peningkatan Nilai tambah Koperasi dan UMKM	0.10%	0.12%	2,622,069,500	0.14%	4,455,378,100	0.16%	4,112,684,200	0.16%	3,788,265,100	Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan fasilitasi UKM, Informal	Kota Bekasi	

Tujuan	Sasaran		Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penang gung jawab	Lokasi	Aktivitas/ Rincian Kegiatan	
											2024		2025		2026		Target	Rp				
											target	Rp	target	Rp	target	Rp						
											7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2		3					4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM						1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Rp 934,7 35,00 0	1%	1,0 16, 355 ,00 0	1%	1,12 8,38 5,10 0	1%	1,40 3,91 1,00 0	Rp. 1.361. 432.33 6.980	3,548, 651,10 0	Bidang Kopera si	Kota Bekasi		
								2	Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM	Rp. 2,005, 714,5 00	1%	1,6 05, 714 ,50 0	1%	3,32 6,99 3,00 0	1%	2,70 8,77 3,20 0	Rp. 132.10 5.130. 824	7,641, 480,70 0	Bidang Usaha Mikro dan fasilita si UKM, Informal	Kota Bekasi		
			2	17	2				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		5%	2%	76, 355 ,00 0.0	2%	100, 000, 000	2%	100, 000, 000	11%	276,3 55,000	Bidang Kopera si	Bekasi	
			2	17	2	201			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	30 unit usaha	150 unit usah a	76, 355 ,00 0	100 unit usah a	100 ,000 ,000	100 unit usah a	100 ,000 ,000	300 Unit Usaha	276,3 55,000	Bidang Kopera si	Bekasi		
			2	17	2	201	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, cabang Kantor Cabang, Cabang	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, cabang Pembantu dan kantor kas	30 unit usaha	150 unit usah a	76,3 55,0 00	100 unit usah a	100, 000, 000	100 unit usah a	100, 000, 000	300 Unit Usaha	276,35 5,000	Bidang Kopera si	Kota Bekasi	Sosialisasi regulasi dan tata cara pembua- tan Ijin Simpan	

Tujuan	Sasaran		Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penang gung jawab	Lokasi	Aktivitas/ Rincian Kegiatan	
											2024		2025		2026		Target	Rp				
											target	Rp	target	Rp	target	Rp						
1	2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Dalam daerah Kabupaten/Kota														Pinjam
			2	17	6	201	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat skala usahanya	0.5%	0.2%	343.380.000	0.2%	463.385.100	0.2%	518,911,000	1.1%	1,376,910,100	Bidang Koperasi	Bekasi			
			2	17	6	201	1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	-	1050 Unit Usaha	343.380.000	135 Unit Usaha	463.385.100	1075 Unit Usaha	518,911,000	3175 unit usaha	1,376,910,100	Bidang Koperasi	Bekasi		
			2	17	6	201	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi	75 unit usaha	1050 Unit usaha	343.380.000	135 unit usaha	463.385.100	1075 Unit Usaha	518,911,000	3175 unit usaha	1,376,910,100	Bidang Koperasi	Bekasi	Pendirian Koperasi bagi kelompok masyarakat strategis (RT, RW, PKK, Karang Taruna, Rumah Ibadah, Kelompok	

Tujuan	Sasaran		Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penang gung jawab	Lokasi	Aktivitas/ Rincian Kegiatan	
											2024		2025		2026		Target	Rp				
											target	Rp	target	Rp	target	Rp						
1	2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
								usaha														Pemuda, dan wanita, Intermedi asi temu bisnis, Hut Koperasi
			2	17	4	201		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi Kesehatannya	8.17%	4%	200 ,00 0,0 00	4%	250, 000, 000	4%	270, 000, 000	20.17%	740,00 0,000	Bidang Kopera si	Bekasi	
			2	17	4	201		Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota		Jumlah Penilaian KSP/USP Koperasi yang wilayah Keanggotaanny a dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	148 unit usaha	65 unit usah a	200 ,00 0,0 00	65 unit usah a	250, 000, 000	65 unit usah a	270, 000, 000	343 unit usaha	740,00 0,000	Bidang Kopera si	Bekasi	
			2	17	4	201	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	120 unit usaha	65 unit usah a	200, 000, 000	65 unit usah a	250, 000, 000	65 unit usah a	270, 000, 000	343 unit usaha	740,00 0,000	Bidang Kopera si	Kota Bekasi	Penilaian Kesehatan KSP/USP, KSPPS/U SPPS, Penghar gaan koperasi berpres tasi dan tokoh gerakan koperasi

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penang gung jawab	Lokasi	Aktivitas/ Rincian Kegiatan	
											2024		2025		2026		Target	Rp				
											target	Rp	target	Rp	target	Rp						
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																						Tingkat Kota Bekasi.
				2	17	5		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	4%	3%	275,000,000	3%	275,000,000	3%	475,000,000	16%	1,275,000,000	Bidang Koperasi	Bekasi	
				2	17	5	201	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	140 orang	150 orang	275,000,000	300 orang	275,000,000	720 orang	475,000,000	2160 orang	1,275,000,000	Bidang Koperasi	Bekasi	
				2	17	5	201	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	140 orang	150 orang	275,000,000	300 orang	275,000,000	720 orang	475,000,000	2160 orang	1,275,000,000	Bidang Koperasi	Bekasi	Diklat dan Uji Kompetensi bagi Benda-hara (Juru Buku) Sosialisasi Perkoperasin Bagi Siswa SMA dan

Tujuan	Sasaran		Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penang gung jawab	Lokasi	Aktivitas/ Rincian Kegiatan	
										2024		2025		2026		Target	Rp				
										target	Rp	target	Rp	target	Rp						
1	2		3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																					SMK di Kota Bekasi
			2	17	3	201	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	8.7%	10%	40, 000 ,00 0	10%	40,0 00,0 00	10%	40,0 00,0 00	38.7%	120,00 0,000	Bidang Kopera si	Kota Bekasi		
			2	17	3	201	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi sesuai peraturan perkoperasian	100 unit usaha	116 unit usah a	40, 000 ,00 0	116 unit usah a	40,0 00,0 00	116 unit usah a	40,0 00,0 00	448 unit usaha	120,00 0,000	Bidang Kopera si	Bekasi		

Tujuan	Sasaran		Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penang gung jawab	Lokasi	Aktivitas/ Rincian Kegiatan
											2024		2025		2026		Target	Rp			
											target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2	17	3	201	1	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 unit usaha	116 unit usah a	40,0 00,0 00	116 unit usah a	40,0 00,0 00	116 unit usah a	40,0 00,0 00	448 unit usaha	120,00 0,000	Bidang Koperas i	Bekasi	Monito- ring koperasi dan penga- wasan koperasi
			2	17	7			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan	15%	10%	905 ,52 7,5 00	10%	828. 471. 900	10%	660, 973, 000	45%	1,726, 861,50 0	Bidang Inform al	Bekasi	

Tujuan	Sasaran		Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penang gung jawab	Lokasi	Aktivitas/ Rincian Kegiatan
											2024		2025		2026		Target	Rp			
											target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2	17	7	201		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		792 unit usaha	10%	905 ,52 7,5 00	10%	828. 471. 900	10%	660, 973, 000	1029 unit usaha	1,876, 861,50 0	Bidang Informal	Bekasi	
			2	17	7	201	1	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		-	65 Unit Usaha	105, 527, 500	65 Unit Usaha	110, 361, 000	-	0	130 Unit Usaha	215,88 8,500	Bidang Informal	Bekasi	
			2	17	7	201	4	Pemberdayaan Kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro		-	20 Unit Usaha	400, 000, 000	50 Unit Usaha	141. 650. 900	-	0	50 Unit Usaha	150,00 0,000	Bidang Informal	Bekasi	

Tujuan	Sasaran		Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penang gung jawab	Lokasi	Aktivitas/ Rincian Kegiatan	
											2024		2025		2026		Target	Rp				
											target	Rp	target	Rp	target	Rp						
1	2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			2	17	7	201	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan	792 Orang	75 Oran g	250,000,000	19 Oran g	100,000,000	75 Oran g	410,973,000	1017 Orang	960,973,000	Bidang Informa 1	Bekasi	
			2	17	7	201	6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 orang	100 Oran g	150,000,000	97 Oran g	476.460.000	50 Oran g	250,000,000	150 orang	550,000,000	Bidang Informa 1	Bekasi	
			2	17	8			Program Pengembangan UMKM		Persentase Peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil	0.3%	0.1%	1.500.187.000	0.1%	2.498.521.100	0.1%	2,047,800,200	0.6%	4,722,993,400	Bidang UMKM	Bekasi	

Tujuan	Sasaran		Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penang gung jawab	Lokasi	Aktivitas/ Rincian Kegiatan	
											2024		2025		2026		Target	Rp				
											target	Rp	target	Rp	target	Rp						
1	2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			2	17	8	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil yang Dikembangkan	54 unit usaha	0.1%	1.500.187.000	0.1%	2.498.521.100	0.1%	2.047.800.200	81 unit usaha	4,722,993,400	Bidang UMKM	Bekasi	
			2	17	8	201	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	250 unit usaha	495 unit usaha	1.500.187.000	900 unit usaha	2.498.521.100	960 unit usaha	2.047.800.200	2252 Unit usaha	957,206,000	Bidang UMKM	Bekasi	PIRT, BCFM, PPUD, Fasilitas Sertifikasi Halal, Kewirausahaan, Kadaluaras, Digital Marketing, Bazar Ramadhan, Decoupage/PKJB

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Bekasi akan dinilai berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi secara langsung menunjukkan target kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Pada pelaksanaannya mendukung sasaran strategis kota yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, jasa dan industri serta iklim usaha berbasis pengalaman (kreatif) dan Investasi. Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, yang ditampilkan dalam table 7.1 berikut ini

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Rp. 1.284.370.129.227	1%	1%	1%	Rp. 1.322.901.233.104

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
2	Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM	Rp. 128.257.408.567	1%	1%	1%	Rp. 132.105.130.824
3	Nilai AKIP DISKOPUKM	75.60	75.80	76.00	76.50	76.50

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja utama untuk Renstra 2024-2026, dengan penetapan target yang berbeda setiap tahunnya. Dalam mendukung pelaksanaan kerjanya Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah ditunjang oleh program-program yang memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

No	Indikator	Kondisi pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan	15%	10%	10%	10%	45%
2	Persentase Peningkatan Skala usaha mikro menjadi usaha kecil	0.3%	0.1%	0.1%	0.1%	0.6%

3	Persentase koperasi Yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	5%	2%	2%	2%	11%
4	Persentase Koperasi yang meningkat skala usahanya	0.5%	0.2%	0.2%	0.2%	1.1%
5	Persentase Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan Perkoperasian	4%	3%	3%	3%	16%
6	Persentase Koperasi yang beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	8.7%	10%	10%	10%	38.7%
7	Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi Kesehatannya	8.17%	4%	4%	4%	20.17%
8	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
9	Optimalisasi Pengembangan sistem pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%

	capaian kinerja dan keuangan					
10	Optimalisasi Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.3.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

No	Indikator	Kondisi pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	13.65%	14%	14.2%	14.3%	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	25.6%	26%	26.2%	26.5%	

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari Dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi untuk periode selama 3 (tiga) tahun mengikuti periode berlakunya RPD Kota Bekasi 2024-2026 yang disusun oleh seluruh jajaran organisasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan/ *stakeholder*.

Potensi dan kondisi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 3 (tiga) tahun mendatang, oleh sebab itu berbagai upaya pemberdayaan dan pengembangan dilakukan Pemerintah Kota Bekasi.

Penyusunan Rencana Strategis 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat fleksibel dan dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, sehingga perubahan dokumen ini akan dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi sehingga bisa diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran organisasi dan target yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Bekasi,

**Plt. KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA BEKASI**



Dra. Rita Hartati, MM

Pembina Utama Tk I/ IV.b

NIP. 19680628 199403 2 012